

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bimantoro Tjokroaminoto, 2001. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Carl Joachim Friedrich, 2010. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, terjemahan, Ujungberung, Bandung.
- Diana Halim Kontjoro, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1993. *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Fathoni, A. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hariandja, E. 2005. *Manajemen Sumber daya Manusia (pengadaan, pengembangan, pengkompensasian, dan peningkatan produktivitas pegawai)*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Hari Chand, 1994. *Modern Jurisprudence, International Law Books Service*, Kuala Lumpur.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* Penerjemah Raisul Muttaqin, Cet ke-1. Bandung Nusamedia dan Nuasa
- Henry G.Hodges, 1956. *Management Principles, Practices and Problem*, The Rlberside Press, Cambridge, Mass.
- Hosio, 2007. *Kebijakan Publik Desentralisasi*, Laksbang, Yogyakarta.
- Ig. Wursanto, 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Jimly Asshiddiqie, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Indonesia*, Ikhtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- J.H.A. Logemann, 1948. *over de theorie van een stellig staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden (*Teori Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ichtiar Baru Van Hoeve).
- John Rawls, 1995. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. Terjemahan : Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo, 2011. *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2003. *Justice as Fairness : a Restatement (United States Of America : President and Fellows of Harvard College*.
- Karen Lebacqz, 1986. *Six Theories of justice*, Augsburg Publishing House, Indianapolis. Terjemahan : Yudi Santoso, 2011. *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, ujung berung, Bandung.
- Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System A Social Sentence Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Mathis, L.R dan Jackcson, J.H. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management)*. PT Salemba Empat, Jakarta
- Max Weber, 1946. *Bereaucracy, From Max Weber, Hans Gerth and C Wright Mills*, Oxford University Press, New York.
- Miftah Toha 1991. *Beberapa Kebijakan Birokrasi*. Widya Mandala, Yogyakarta.
- , 2001. *Dimensi Prima Administrasi Negara*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- , 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Kadarisman, 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum I dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Musanef, 1996. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta.

- Philippe Nonet and Philip Selznick, 1978. *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper & Row.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1980. *Administrasi dan Management Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.M. Hadjon, 1997. *Wewenang*, dalam jurnal *Yuridika*, Edisi Nomor 5 Tahun 6 Tahun XII, Hlm 3.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Admininistrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Roberto Mangabeira Unger 1983. *The Critical Legal Studies Movement, Terjemahan Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Sjachran Basah, 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Administrasi di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung.
- , 1997. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, disampaikan pada Dies Natalis XXIX Unpad, Bandung.
- S.F. Marbun, 2003. *Peradilan Adminstrasi Dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberti, Yogyakarta.
- Soekijo Notoatmodjo, 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1992. *Kerangka Dasar Dalam Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1995. *Teori Pengembangan Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1999. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 1999. *Manajemen Strategik*, Bumi Aksara, Jakarta.

T.Hani Handoko, 1987. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE Yogyakarta.

Topo Santoso, 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syaamil, Jakarta

Veithzal Rivai, 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Utrecht. E, 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia.*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

-----, 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

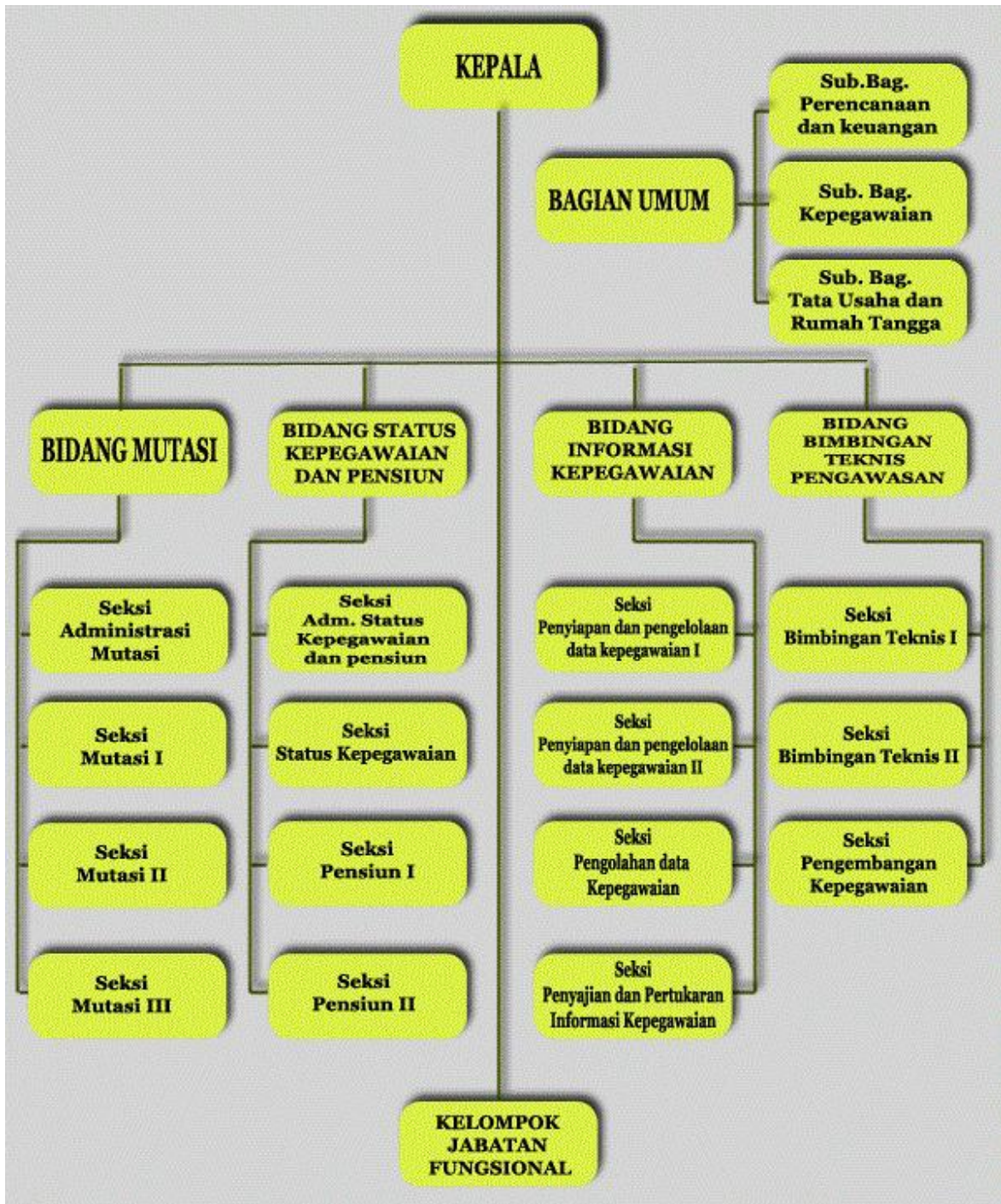
Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Struktur Organisasi Kantor Regional IV BKN Makassar
 Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/2001
 Tanggal 27 Agustus 2001

Keadaan Tanggal 01 September 2013



Sumber : Data Dokumen Kantor Regional IV BKN, 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural berdasarkan Eselon Tertinggi sampai dengan Eselon Terendah dan Jenjang Pangkat untuk setiap Eselon

No	Eselon	Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol/ Ruang	Pangkat	Gol/ Ruang
1	2	3	4	5	6
1	I a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2	I b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3	II a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
4	II b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5	III a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6	III b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
7	IV a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8	IV b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c
9	V a	Penata Muda	III/a	Penata Muda Tingkat I	III/b

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang tunjangan jabatan struktural berdasarkan Eselon (tingkatan jabatan struktural) dari Eselon Tertinggi sampai dengan Eselon Terendah :

No	Eselon	Besar Tunjangan
1	2	3
1	I A	Rp 5.500.000,00
2	I B	Rp. 4.375.000,00
3	II A	Rp 3.250.000,00
4	II B	Rp 2.025.000,00
5	III A	Rp 1.260.000,00
6	III B	Rp 980.000,00
7	IV A	Rp 540.000,00
8	IV B	Rp 490.000,00
9	V A	Rp 360.000,00

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan
Eselon jabatan Perangkat Daerah Provinsi

No	Jabatan	Eselon
1	2	3
1	Sekretaris daerah	I b.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten, • sekretaris DPRD, • kepala dinas, • kepala badan, • inspektur, dan • direktur rumah sakit umum daerah kelas A 	II a.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala biro, • direktur rumah sakit umum daerah kelas B, • wakil direktur rumah sakit umum kelas A, dan • direktur rumah sakit khusus daerah kelas A 	II b
4	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala kantor, • kepala bagian, • sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, • kepala bidang dan inspektur pembantu, • direktur rumah sakit umum daerah kelas C, • direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, • wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas B, • wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A, • dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan 	III a
5	Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit daerah	III b
6	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala seksi, • kepala sub bagian, dan • kepala sub bidang 	IV a

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan Eselon Jabatan Perangkat
Daerah Kabupaten / Kota

No	Jabatan	Eselon
1	2	3
1	Sekretaris daerah	II a
2	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten, • sekretaris DPRD, • kepala dinas, • kepala badan, • inspektur, • direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan • direktur rumah sakit khusus daerah kelas A 	II b
3	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala kantor, • camat, • kepala bagian, • sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, • direktur rumah sakit umum daerah kelas C, • direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, • wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan • wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A 	III a
4	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala bidang pada dinas dan badan, • Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, • direktur rumah sakit umum daerah kelas D, dan • sekretaris camat 	III b

No	Jabatan	Eselon
1	2	3
5	<ul style="list-style-type: none"> • Lurah, • kepala seksi, • kepala sub bagian, • kepala sub bidang, dan • kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan 	IV a
6	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris kelurahan, • kepala seksi pada kelurahan, • kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis, • kepala tata usaha sekolah kejuruan dan • kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan 	IV b
7	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat Pertama, dan • kepala tata usaha sekolah menengah 	V a

Sumber : Data Dokumen BKN, 2013.